

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembangunan jalan tol merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan pemerintah dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan Infrastruktur jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional bermanfaat untuk memperlancar kegiatan mobilitas masyarakat serta kelancaran pendistribusian barang dan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di suatu Negara dan/atau daerah merupakan kebutuhan masyarakat saat ini.
2. Kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Terwujudnya sistem jaringan jalan nasional yang saling terintegrasi dan berkelanjutan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan/atau daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Alternatif yang dipergunakan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan dengan pembangunan jalan tol. Dengan adanya pembangunan dan pengoperasian

jalan tol, diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem jaringan jalan nasional yang terintegrasi serta berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diperlukan partisipasi dari setiap pihak untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya pemegang hak atas tanah, mengenai makna kepentingan umum dalam kegiatan pembangunan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat melalui pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Bagi Pemerintah, selaku pelaksana pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol sebagai salah satu kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hendaknya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, kemanusiaan, musyawarah mufakat, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperlukan agar pembangunan jalan tol dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga masyarakat.

DAFTAR PUSATAKA

Buku-buku :

A.P. Parlindungan, 2008, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Kesembilan, Bandar Maju, Bandung.

Adrian Sutedi, Adrian., 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Gunanegara., 2008, *Rakyat dan Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jhon Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Maria S.W. Sumardjono., 2009, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan VI, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Cetakan ketujuh, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong., 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Skripsi :

Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal :

Youdhi Permadi Ma'ruf dan Jeluddin Daud, 2013, "*Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di*

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Teknik Sipil USU, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013.

Makalah :

Maria S.W. Soemardjono, 1990, "*Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik*", Sebuah Catatan Untuk Makalah Chadijdjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA", Makalah Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, 2010, Jakarta,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Website :

K. Yudha Wirakusuma, Selain Tol JORR, Ini Jalan Tol Yang Dapat Dilintasi Sepeda Motor, hlm. 1. <http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/04/417950/selain-tol-jorr-ini-jalan-tol-yang-dapat-dilintasi-sepeda-motor>, diakses 9 September 2015.

Naraya, Hukum Non Kontradiksi Menguji Sebuah Porsi Fundamental Dalam Kekristenan.

http://www.kompasiana.com/narayangadas/hukum-non-kontradiksi-menguji-sebuah-proposisi-fundamental-dalam-kekristenan_5528bef96ea83412268b461f, diakses 23 Mei 2015

Prima Jayatri, Jenis-Jenis Metode dan Konstruksi Hukum. <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-menurut-bahasa-gramatikal/>, diakses 27 Mei 2015.

Putu Eka Swastini, I Gde Sukarasa dan I putu Eka N. Kencana, Aplikasi Multivariate Multiple Regression Untuk Menduga Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat, hlm. 1.

https://www.academia.edu/9357528/APLIKASI_MULTIVARIATE_MULTIPLE_REGRESSION_UNTUK_MENDUGA_FAKTOR_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KESEJAHTERAAN_MASYARAKAT, diakses 4 April 2016.

Rahman Amin, Filsafat Hukum Aliran Utilitarianisme Dan Relevansinya Di Indonesia.

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/filsafat-hukum-aliran-utilitarianisme.html>, diakses 17 April 2015.

Wiwik Harjanti, Pengaruh perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia.
<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/6.-Pengaruh-Perkembangan-Konsep-Kepentingan-Umum-Terhadap-Pelaksanaan-Pembangunan-di-Indonesia-Wiwik-Harjanti.pdf>, diakses 11 September 2015.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Lembaran Negara RI 1960/104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288. Sekretaris Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara RI Nomor 5280. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

15 tahun 2005 tentang jalan tol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Di Atasnya

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Oktober 2015

Nomor : 074/2433/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Nomor : 795/V
Tanggal : 27 Oktober 2015
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT" kepada :

Nama : FERRY KIE
NIM : 110510667
No. HP/Identitas : 0856 6891 1105 / 2171061510920002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 02 November s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

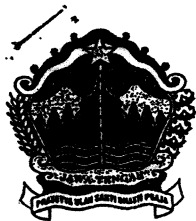
Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- ③ Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 09 November 2015

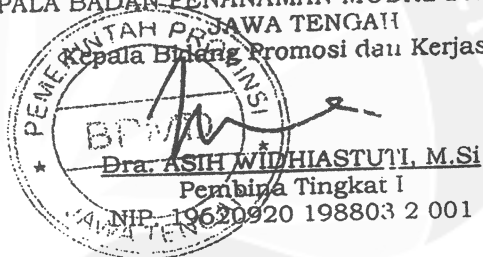
Nomor : 070/500/2015
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Semarang
u.p. Kepala Badan Kesbangpol
Kota Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Ijin penelitian Nomor 070/2894/04.5/2015 Tanggal 09 November 2015 atas nama FERRY KIE dengan judul proposal KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala PT. Trans Marga Provinsi Jawa Tengah;
8. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Sdr. FERRY KIE.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 -- 3547438 -- 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmdd@jatengprov.go.id http ://bpmdd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR : 070/2894/04.5/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2433/Kesbang/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FERRY KIE.
2. Alamat : Tanjung Uma No.08 Rt 001/Rw 006, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

- Untuk :
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Proposal : KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.
 - b. Tempat / Lokasi : Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga dan PT. Trans Marga Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Bidang Penelitian : Hukum.
 - d. Waktu Penelitian : 09 November s.d. 31 Desember 2015.
 - e. Penanggung Jawab : 1. SW. Endah Cahyowati, SH., NS
2. D. Krismantoro, SH., M.Hum
 - f. Status Penelitian : Baru.
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

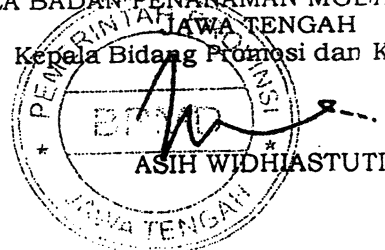
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 November 2015

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon (024) 7608358
Faksimile (024) 7613181 E-mail : disbinmarga@yahoo.com
Website : http://binamarga.jatengprov.go.id

LEMBAR DISPOSITSI

R P B

Tanggal: 24/10/2012
Perihal: Riset Ferry
Asas: ...

Kode: 011/1453

BDIX

Fakultas Teknik

KEPALA DINAS BINA MARGA

TGL. PENYELISIAAN

- Sekretaris
- Kepala Bidang Bina Teknik
- Kepala Bidang Pembangunan Wil. Barat
- Kepala Bidang Pembangunan Wil. Tengah
- Kepala Bidang Pembangunan Wil. Timur
- Kelompok Jabatan Fungsional

Handwritten signature and initials

DISPOSISI KEPADA

- Ka. Sub Region
- Ka. Sekeloa
- PPK
- Lainnya

CATATAN:

Handwritten note

Handwritten signature and initials

Handwritten note: B. P. H. + P. R. ...

- Untuk diselesaikan
- Untuk menjadikan periksa
- Untuk seperlunya
- Untuk dijawab
- Untuk diikuti
- Untuk diperbanyak
- Untuk arsip
- Untuk dikonfirmasikan / dibicarakan
- Dengan

AGENDA TU KEPALA DINAS
TGL: 18.11.12
NO: 10.000

20/11/2012

AGENDA TU SEKRETARIS
TGL: 17.11.12
NO: 1000

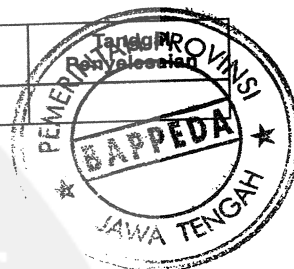
Buku → B1 merk (cover merk)

Tersedia lain ...

Lembar Disposisi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Bappeda Prov. Jawa Tengah

Nomor Surat	761/V
Tanggal Surat	22-10-2015
Dari	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Isi Informasi	Ijin Riset/penelitian a.n. Ferry Kie
Perihal	Ijin Riset
Nomor Pencatatan Kendali	070 / 7815
Diteruskan	16-11-2015

No	Dari	Diteruskan Kepada	Isi Disposisi	Tanggal & Paraf
1	Kepala	Unit SPE	Diterima	16-11-2015





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Telp. 8310388 - 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax. 8310392

NOTA DINAS

Nomor: 98 / ND-33/XI/ 2015

Kepada : Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
Dari : Kepala Bagian Tata Usaha
Tanggal : 27 November 2015
Sifat : Biasa
Perihal : Ijin Riset

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 762/V perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami hadapkan :

Nama : Ferry Kie
NIM : 10667
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Bermaksud akan melakukan riset di bidang Saudara yang akan dipergunakan untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat”.

Sehubungan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk membantu yang bersangkutan seperlunya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Bagian Tata Usaha

Sunu Duto Widjomarmo, SH.,M.Kn.
NIP. 19610810 198903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)